



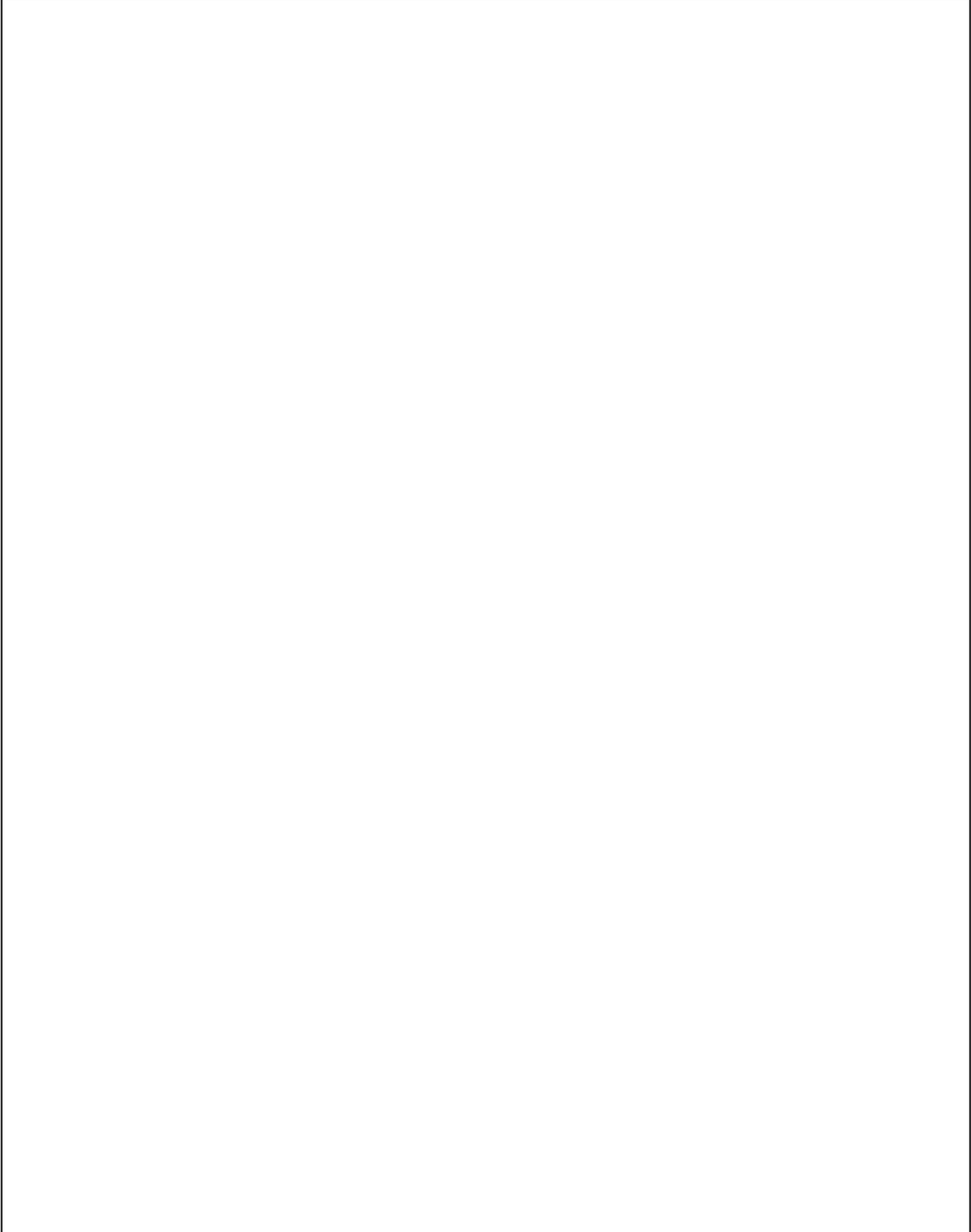
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Media Indonesia

Hari: Kamis

Tanggal: 02 April 2020

Halaman: 1



jadi kebijakan pemerintah kami siap melaksanakan dan mengamankan,” kata Jenderal Idham dalam rapat kerja virtual dengan Komisi III DPR, kemarin.

Idham mengatakan Polri juga siap bersikap tegas dalam upaya patroli yang dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan.

Jamin hak

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Intan Fauzi, mengatakan negara dituntut menjamin hak-hak masyarakat di tengah penanggulangan virus korona. Dengan demikian, setiap kebijakan yang menjadi keputusan pemerintah harus efektif dan tetap menjamin keberlangsungan hidup masyarakat.

Anggota Komisi III DPR, Habiburokhman, menyebutkan status

karantina wilayah lebih relevan diterapkan dalam menghadapi pandemi covid-19 jika dibandingkan dengan darurat sipil. “Yang lain sudah tidak relevan,” kata Habiburokhman dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Idham Azis secara virtual, kemarin.

Di lain pihak, komisioner Komnas HAM Amiruddin menilai pemberlakuan darurat sipil tidak tepat dalam penanganan pandemi covid-19 dan bahkan bisa berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Daripada merancang darurat sipil yang mengandung banyak potensi pengingkaran pada HAM, terutama hak-hak sipil dan politik, lebih baik pemerintah fokus merancang secara saksama upaya untuk mencegah perluasan penyebaran covid-19,” ujar dia melalui keterangan tertulis, kemarin. (Pro/Van/Cah/Ant/X-6)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005